

**BUKU PANDUAN ADVOKASI  
LEMBAGA DAKWAH FAKULTAS KEDOKTERAN**



**DEPARTEMEN KAJIAN KEDOKTERAN ISLAM DAN ADVOKASI  
FORUM UKHUWAH LEMBAGA DAKWAH FAKULTAS KEDOKTERAN  
INDONESIA**

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu.

Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusanNya.

Allahumma shalli 'ala Muhammad, wa 'ala ali wasahbihi wassalim. Salawat dan keselamatan semoga tercurahlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad juga kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya serta orang-orang yang sabar serta tekun mengikuti dan menjalani risalahnya hingga berakhirnya dunia ini kelak.

Alhamdulillah.. Buku panduan advokasi ini dapat terselesaikan juga. Berawal dari kegiatan advoclassy, yaitu salah satu program kerja departemen Kajian Kedokteran Islam dan Advokasi (KKIA) yang menyediakan wadah bagi Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran (LDFK) untuk belajar lebih dalam mengenai advokasi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, advoclassy ini terbilang sulit untuk diadakan, karena sulitnya mencari pemateri, mengumpulkan peserta dan juga media online yang bisa dibidang terbatas. Sehingga, muncul ide untuk membuat buku panduan advokasi.

Diharapkan dengan adanya buku ini, LDFK dapat memanfaatkannya sebagai panduan dalam melakukan advokasi di lingkungan FK. Sehingga, apabila ada permasalahan yang muncul mengenai kebijakan atau keputusan tertentu, maka LDFK dapat membuka buku ini dan mulai mengambil tindakan advokasi. Di dalam buku ini dijelaskan: peran penting advokasi LDFK, bagaimana seharusnya bertindak mengenai isu yang muncul dan juga disertai contoh proposal ajuan advokasi.

Demikian pengantar ini kami sampaikan, syukran wa jazakumullahu khairan katsira, wa barakallaahu fiikum.

Bukittinggi, 10 Desember 2015

Alliffabri Oktano, S.Ked

Kepala Departemen KKIA DEP FULDFK 2015



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
A. Peran Advokasi Dakwah Profesi Kedokteran.....	1
a. Advokasi Dalam Perspektif Islam.....	1
b. Pentingnya Advokasi LDFK .....	2
c. Apa itu advokasi? .....	3
d. Advokasi dan pengambil keputusan .....	4
B. Komponen Tekhnis Advokasi.....	5
C. Bentuk dan Alur Advokasi .....	5
D. Alur Umum Advokasi LDFK .....	6
a. Menentukan Isu, Alasan dan Tujuan .....	7
b. Menetapkan Sikap Terhadap Isu Dengan Kepenatingan Organisasi.....	8
c. Membentuk Lingkaran Inti .....	8
d. Mengumpulkan Data .....	11
e. Mengidentifikasi Pihak Pro dan Kontra .....	16
f. Membentuk Aliansi .....	17
g. Menggunakan Media, Mengemas Isu dan Membentuk Opini Publik.....	18
h. Mempengaruhi Sasaran Advokasi.....	21
i. Melakukan Pengawasan .....	22
j. Adanya Respon dan Evaluasi .....	23
E. Contoh Proposal Ajuan Advokasi.....	24
Daftar Pustaka .....	33



# PERAN ADVOKASI DAKWAH PROFESI KEDOKTERAN

## A. PENGERTIAN DAN PENTINGNYA ADVOKASI LDFK

### Advokasi Dalam Perspektif Islam

Alkisah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, seorang gubernur Mesir hendak membangun sebuah masjid agung. Dalam rangka pembangunan masjid tersebut, dilakukan penggusuran tanah dan rumah yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Sang yahudi tidak menerima penggusuran ini karena tidak diberi kompensasi uang atau ganti rugi yang layak. Namun sang gubernur tidak menghiraukan protes pemilik rumah tersebut, dan dengan tanpa ampun menggusurnya, kemudian mendirikan masjid di atasnya. Melihat kenyataan tersebut, sang Yahudi kemudian menuntut keadilan ke “pemerintahan pusat” di Madinah. Akhirnya sampai di hadapan khalifah Umar bin Khattab, dan kemudian mengadukan perlakuan tidak adil yang diterimanya. Setelah menyimak dengan seksama pengaduan sang Yahudi, Umar bin Khattab ra, mengirimkan pesan melalui tulang yang digaris tengah, kepada sang Yahudi dan diminta menyampaikan kepada Gubernur Mesir. Setelah sampai, pesan tersebut dapat dibaca oleh sang gubernur sehingga memaksanya untuk mengembalikan kembali hak yahudi tersebut. Tanah dan rumahnya dikembalikan. Lepas dari kasus tersebut, peristiwa ini justru menjadi wasilah Islamnya Yahudi tersebut karena melihat sendiri prinsip penegakan keadilan dalam Islam, sekaligus kemudian merelakan tanahnya untuk dibangun Masjid.

Alkisah lagi, diceritakan, seorang tokoh masyarakat terpendang yang bernama Ibn Aiham, yang belum lama masuk Islam, melakukan umrah. Ketika sedang thowwaf tanpa sengaja selendangnya terinjak seorang baduwi (masyarakat pinggiran). Kemudian marah dan memukul sang baduwi. Sang Baduwi yang merasa lemah meminta perlindungan terhadap Umar bin Khattab. Oleh Umar bin Khattab, Baduwi tadi disuruh untuk membalas memukul tokoh masyarakat tersebut sebagaimana ia dipukul.

Kisah lain yang amat terkenal adalah pembelian budak yang dilakukan Abu Bakkar As-Shiddieq terhadap Bilal bin Robbah. Bilal saat itu masih merupakan hamba bangsawan kuffar quraisy yang menyiksanya karena beliau menyatakan beriman. Posisi Bilal sebagai budak, dalam system sosial saat itu, tidak memungkinkan orang lain untuk campur tangan. Kekuasaan atasnya berada di tangan tuannya. Maka, untuk membebaskan Bilal dari penyiksaan Bilal dibeli dan selanjutnya dimerdekakan.



Tiga contoh tersebut, dan masih banyak contoh lainnya, mencerminkan tradisi advokasi dalam sejarah Islam. Apa yang dilakukan oleh Umar dan Abu Bakar, jika dibahasakan dalam bahasa gerakan sosial, adalah advokasi. Kasus pertama adalah advokasi terhadap hak kepemilikan tanah. Kasus kedua adalah advokasi menerapkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, dan perlindungan terhadap kaum lemah. Kasus ketiga menunjukkan advokasi terhadap perlakuan tidak manusiawi terhadap manusia. Tradisi advokasi pada dasarnya bukan tradisi yang baru dalam Islam, bahkan memiliki akar sejarah yang panjang sejak zaman Nabi saw. Dengan melihat contoh-contoh di atas, maka advokasi merupakan gerakan sosial yang memiliki landasan teologis yang amat kuat. Advokasi dalam Islam tidak lain dari manifestasi kepedulian yang menjadi keharusan untuk bergerak, baik melalui gerakan sosial, tuntutan/desakan, atau setidaknya hati, ketika menyaksikan ketidakadilan di muka bumi.

### **Pentingnya Advokasi LDFK**

Sering kali kata advokasi melekat pada seorang pengacara. Padahal, jika dikupas lebih jauh, advokasi memiliki arti yang cukup luas. Advokasi juga tindakan yang sering ditemui di lingkungan manusia. Seperti sebuah pergerakan yang bisa mengubah keputusan seseorang atau bahkan membentuk sebuah kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya. Entah itu kebijakan yang bermanfaat ataupun merugikan. Advokasi bisa dilakukan oleh siapapun, tanpa memandang dari golongan manapun. Bila pelaku advokasi itu berniat baik, maka tujuan advokasi yang dilakukan pastilah yang bermanfaat dan positif. Bila pelaku advokasi memiliki niat dan tujuan yang buruk, maka keburukan jualah yang akan dihasilkan.

Dalam sebuah pergerakan dakwah atau organisasi dakwah, advokasi adalah salah satu bagian penting dalam melancarkan visi dan misinya. Kenapa? Karena tidak selamanya pergerakan tersebut dapat berjalan dengan mulus dan tidak selamanya dakwah itu ceramah dari mimbar ke mimbar. Tapi juga dibutuhkan seni di dalamnya. Perlu semacam strategi yang lebih manis dan elegan.

Lembaga dakwah fakultas kedokteran berperan untuk menyampaikan dakwahnya di lingkungan FK. Tentunya dengan kreativitas dan seni dakwah yang disesuaikan dengan subjek dakwah. Dalam perjalanannya, sering kali ditemukan masalah-masalah yang menyangkut kebijakan, misalnya kebijakan yang dibuat oleh dekanat, organisasi lain atau dapat juga personal. Terkadang kebijakan tersebut



tidaklah menguntungkan untuk LDFK ataupun tidak sesuai dengan visi LDFK. Maka, di sinilah peran advokasi. Sifatnya kondisional, dapat dengan mengubah kebijakan tersebut ataupun membuat sebuah kebijakan yang pro terhadap islam.

### **Apa Itu Advokasi?**

Banyak orang masih menganggap bahwa advokasi merupakan kerja-kerja pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum semata.

Pandangan semacam itu bukan selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni *advocaat* yang tak lain memang berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata *advocate* dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas, yaitu berasal dari kata *to advocate* yang artinya membela.

Berbicara advokasi, sebenarnya tidak ada definisi yang baku. Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu. Advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan. Setidaknya ada beberapa pengertian dan penjelasan terkait dengan definisi advokasi, yaitu:

1. Usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi atau penetapan sebuah gerakan yg ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat dan individu (John Hopkins University/Center for Communication).
2. Upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata (Institut Advokasi Washington DC).



3. Usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi, atau pelaksanaannya (Meuthia Ganier).
4. Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja (Yusuf Effendi)

Bila kita hubungkan dari beberapa definisi advokasi di atas dengan LDFK, maka advokasi oleh LDFK adalah sebuah usaha dalam ruang lingkup FK untuk merubah ataupun membentuk sebuah kebijakan yang pro kepada kebaikan dan kebermanfaatannya sesuai dengan visi dan misinya.

### **Advokasi dan Pengambil Keputusan (Kebijakan)**

Sebuah kebijakan atau keputusan sangatlah erat hubungannya dengan pengambil keputusan. Terkadang, pengambil keputusan (puncak tertinggi) dalam memutuskan, bisa saja tidak menguntungkan salah satu pihak tanpa disadarinya. Sebuah kewajaran, apabila akan ada kelompok yang kontra terhadap keputusan yang dihasilkan, karena tiap kelompok memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda.

Di lingkungan FK, biasanya yang berperan mengambil keputusan adalah dekan, dosen, dan BEM (badan eksekutif mahasiswa) atau senat. LDFK secara struktur organisasi dapat berada di bawah BEM atau berdiri sendiri sebagai badan otonom. Kondisi ini akan membuat lahan dan pergerakan advokasi juga berbeda. Bila muncul sebuah kebijakan yang tidak menguntungkan LDFK atau tidak sesuai dengan visi LDFK, maka advokasi adalah mempengaruhi pengambil keputusan tersebut. Begitu juga apabila LDFK ingin menciptakan pembaruan dalam hal kebijakan tertentu, advokasi dengan melobi dan mempengaruhi pengambil keputusan harus dilakukan.

Keputusan tersebut tidak saja dapat muncul dari organisasi yang berada di atas LDFK, tetapi bisa juga dari organisasi lain yang sederajat di intra fakultas, di luar fakultas bahkan dari individu-individu tertentu. Misalnya saja dosen yang membuat aturan untuk mahasiswanya, wakil dekan tiga yang membuat keputusan tertentu tentang organisasi intra FK dan contoh lainnya.

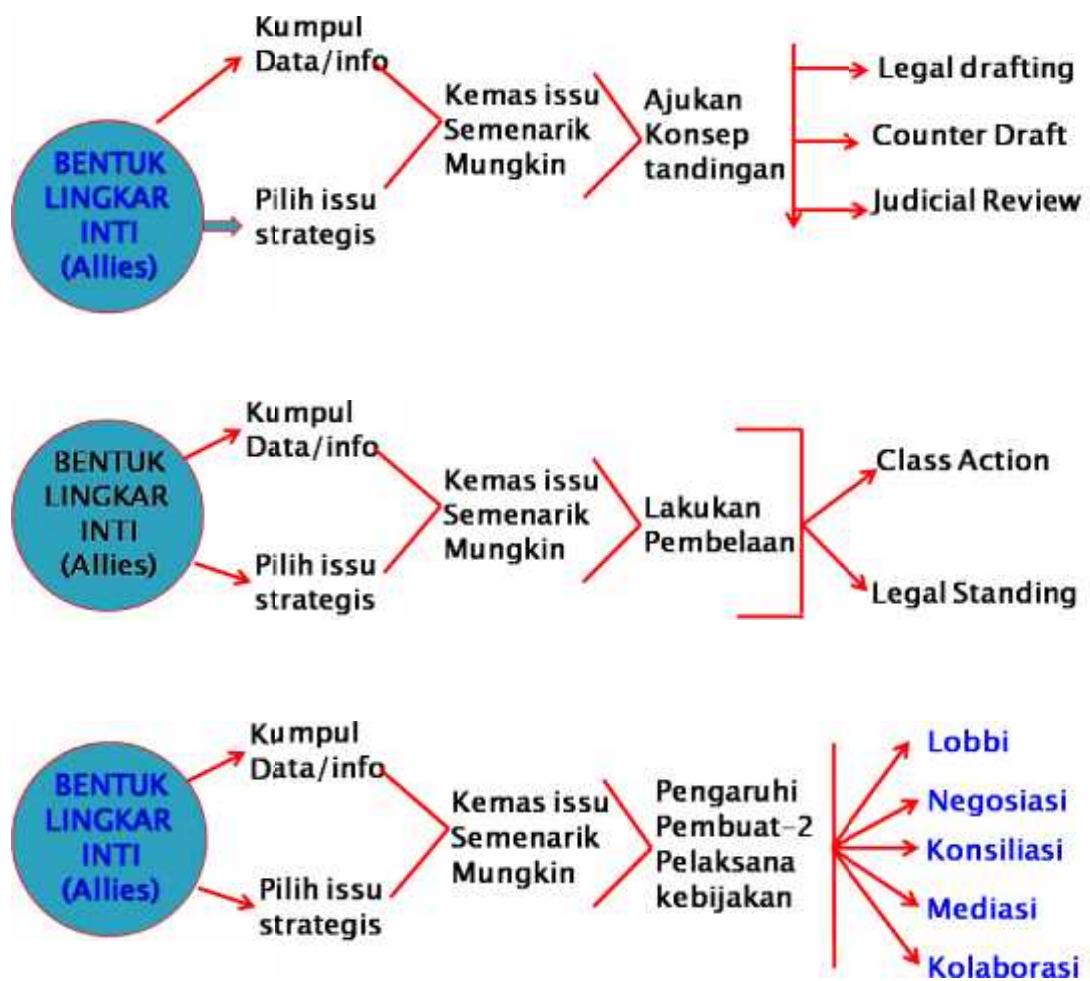


## B. KOMPONEN TEKHNIS ADVOKASI

Secara umum, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh LDFK dalam melakukan advokasi, dikenal dengan komponen teknis advokasi. Antara lain :

1. Adanya isu yang akan diangkat atau masalah yang muncul
2. Memiliki Alasan dan tujuan
3. Subjek : pelaku advokasi
4. Data : data penunjang proses advokasi
5. Aliansi : pihak yang memiliki kepentingan yang sama dan mau bekerjasama
6. Media : kemasan aksi advokasi
7. Sasaran : pemegang keputusan
8. Respon : hasil advokasi

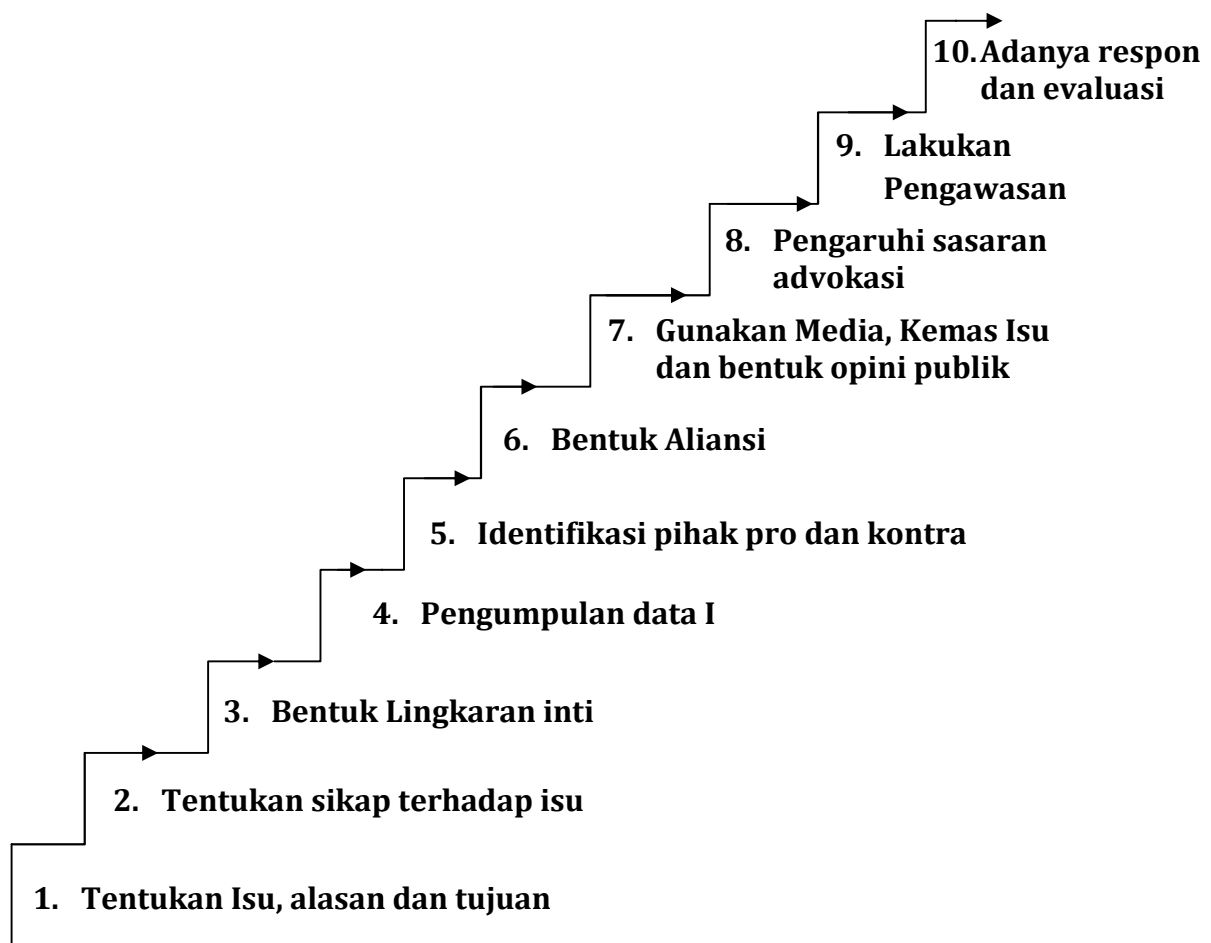
## C. BENTUK DAN ALUR ADVOKASI







#### D. ALUR UMUM ADVOKASI LDFK



## 1. MENENTUKAN ISU, ALASAN DAN TUJUAN

Dalam melakukan advokasi, tentunya harus memiliki alasan dan tujuan yang jelas. Tidak mungkin munculnya asap tanpa didahului adanya api. Begitu juga advokasi. Alasan muncul apabila ada sebuah masalah yang berhubungan dengan kebijakan di lingkungan FK. Sebuah LDFK harus tahu kapan diperlukannya kegiatan advokasi. Oleh karenanya perlu untuk mengidentifikasi masalah yang prioritas menurut LDFK tersebut.

Selalu ingat bahwa advokasi adalah cara untuk membentuk aturan yang mengikat sistem tertentu. Pembentukan itu bisa berasal dari 2 keadaan, (1) belum adanya aturan yang diinginkan dan ingin dimunculkan sebagai aturan yang sah, atau (2) adanya aturan yang sah namun keberadaannya tak diinginkan.

Sejumlah masalah harus dipilih sesuai urutan prioritas. Kriteria tersebut antara lain:

- Masalah yang menyangkut kebijakan, hukum atau peraturan khusus yang beorientasi pada Islam
- Masalah menyangkut kebijakan yang mempengaruhi pergerakan dakwah LDFK
- Masalah yang menyangkut kesejahteraan masyarakat FK
- Masalah dengan kemungkinan besar untuk dapat diselesaikan dalam jangka pendek
- Masalah yang didukung oleh mayoritas anggota dan permasalahan kontroversial yang dihindari jajaran anggota
- Masalah yang proaktif dan reaktif
- Masalah yang tidak ditentang oleh golongan mayoritas di masyarakat FK
- Masalah yang tidak akan menghancurkan citra atau reputasi LDFK

Nantinya apabila sudah didapatkan masalah prioritas yang akan diadvokasi LDFK, maka tujuan pun dapat ditentukan.

Adapun contoh masalah yang sering ditemukan dan sering diangkat oleh LDFK di Indonesia misalnya: isu pembubaran LDFK, Aturan kuliah dengan pakaian syar'i, kegiatan-kegiatan bersifat hedonisme yang diizinkan dekanat FK, jadwal kuliah yang mengambil waktu shalat dan istirahat, lingkungan FK bebas roko, pembagian dana untuk organisasi intra FK, penyebaran aliran-aliran sesat dan contoh lainnya.



## **2. MENETAPKAN SIKAP TERHADAP ISU DENGAN KEPENTINGAN ORGANISASI**

Bila sudah didapatkan isu sesuai dengan piroritas. Maka LDFK harus menentukan sikap terhadap isu. Terlebih lagi bila isu yang muncul tersebut terkait dengan kebijakan yang menyangkut visi dan misi LDFK. Maka sudah seharusnya LDFK memulai membentuk tim advokasi.

## **3. MEMBENTUK LINGKARAN INTI**

Untuk mencapai advokasi yang sukses diperlukan pengorganisasi yang baik, yaitu tim advokasi. Tim advokasi adalah tim yang menjalankan kegiatan advokasi, memiliki pandangan yang sama dan keahlian terhadap agenda/kasus yang akan dilakukan. Biasanya terdiri dari orang-orang yang dipercaya dalam sebuah organisasi.

### **Pembentukan Tim Advokasi**

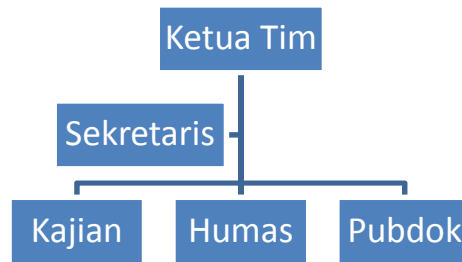
Penetapan bentuk organisasi advokasi sangat bergantung pada bobot serta kompleksitas permasalahan yang harus diatasi. Makin kompleks dan banyak dimensi isu yang akan ditindaklanjuti dengan advokasi, semakin banyak aspek yang harus dibahas dan diputuskan, dan tentunya semakin banyak pula waktu dan tenaga yang dibutuhkan.

### **Komponen Kompetensi yang Harus Dimiliki**

1. Komunikasi efektif
2. Manajemen aksi
3. Kajian dan publikasi isu
4. Manajemen opini publik
5. Negosiasi dan lobbying
6. Teknik pengawasan



## Struktur Tim



Dalam sebuah tim, haruslah memiliki ketua tim sebagai pemimpin dan sekretaris. Untuk anggota tim bisa disesuaikan dengan kondisi kasus yang dihadapi. Dari bagan di atas, adalah contoh untuk sebuah tim advokasi.

Begitu tim advokasi dibentuk dan staf direkrut maka ketua tim harus segera melakukan berbagai diskusi dengan para anggota dan stafnya, membuat rencana jadwal rapat berkala secara konsisten. Rapat berkala akan berguna untuk memastikan terbentuknya kolaborasi yang efektif dan segera menyelesaikan masalah yang ada. Frekuensi pertemuan diatur sesuai banyaknya kegiatan sehingga dimungkinkan untuk berubah setiap waktu.

### Ketua Tim dan Sekretaris

Ketua berperan sebagai pemimpin dalam sebuah tim. Untuk memastikan bahwa seorang ketua tim dapat mencurahkan waktu yang diperlukan untuk tim advokasi, maka ketua tim semestinya bukanlah pemimpin organisasi (ketua LDFK). Nantinya ditakutkan tujuan dari dibentuknya tim advokasi tidak akan tercapai, karena pimpinan LDFK juga mempunyai tanggung jawab lain. Namun demikian, seorang ketua tim harus memiliki hubungan kerja yang baik dengan pimpinan organisasi, para anggota tim maupun dengan anggota organisasi secara umum. seorang ketua kelompok kerja idealnya memiliki:

- Keahlian membangun tim dan jiwa kepemimpinan yang sudah terbukti
- Pemahaman yang mendalam mengenai lingkungan pembuatan kebijakan
- Koneksi yang diperlukan dengan para pembuat kebijakan yang relevan

Untuk memenuhi misinya secara efektif dan tepat waktu, sangat dianjurkan agar tim advokasi memiliki anggaran dan jajaran stafnya sendiri. Jika memang ada anggaran, maka tim harus menyusun rancangan anggaran dan kebutuhan guna pelaksanaan



rencana kegiatan. Misalnya, tim membutuhkan dana untuk keperluan kajian, mulai dari kertas, biaya cetak dan lainnya, atau tim publikasi dan dokumentasi membutuhkan biaya untuk keperluan media publishingnya.

Keberadaan sekretaris dalam sebuah struktur organisasi atau kepanitiaan sudah menjadi keharusan, termasuk pada tim advokasi. Hampir sama dengan tugas sekretaris biasanya. Seperti mencatat hasil diskusi tim, membuat surat (bila diperlukan) dan membantu ketua. Sekretaris dapat juga berperan sebagai wakil ketua.

### **Kajian dan Publikasi Isu**

Dalam melakukan advokasi, kajian adalah salah satu bagian penting. Tahap ini adalah proses pengemasan isu agar publik, aliansi, dan pemegang keputusan menerima sudut pandang kita terhadap isu yang kita angkat. Tim kajian juga berperan dalam melakukan survey bila diperlukan dengan bantuan HUMAS.

Sebaiknya tim kajian adalah orang-orang yang ulet dan kritis. Kajian juga membutuhkan data-data. Kreativitas dalam menghubungkan data-data yang didapatkan dengan isu, akan membantu kesuksesan advokasi. Dalam bekerja, Anggota kajian bisa juga bekerja sama dengan pakar yang dapat dipercaya. Misalnya, dosen atau staf pengajar yang pro terhadap isu yang akan diangkat.

Membuat kajian dan analisis data, terkadang memaksa tim advokasi mempersiapkan rencana lain sebagai solusi atau ide baru. Misalnya, memberikan ide-ide unik dan menarik untuk merubah sebuah peraturan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan visi dan misi LDFK. Sehingga pembuat kebijakan akan ikut tertarik dengan ide-ide tersebut.

### **Hubungan Masyarakat**

Anggota HUMAS juga punya peran penting di advokasi ini. Tugasnya dapat berupa membuat *link* dengan kelompok yang dapat dijadikan aliansi, mendampingi ketua dalam negosiasi atau *lobbying*, serta membantu proses manajemen aksi (bila diperlukan), mengatur pertemuan dengan pemegang keputusan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan hubungan masyarakat.

Humas juga bertugas sebagai "pengawas", yang bertanggungjawab memantau apa terjadi terkait isu tertentu. Ini berarti bahwa mereka harus berada di "garis depan" dalam hal memperoleh informasi terhadap apa yang sedang dilakukan atau sedang



menjadi masalah. Informasi yang aktual ini akan mengurangi terjadinya kebijakan yang mendadak dan mengejutkan, serta memberikan cukup waktu untuk melakukan pembahasan serta antisipasi sebelum kebijakan tersebut diperdebatkan atau diberlakukan. Sebuah kebijakan akan lebih mudah dipengaruhi sebelum diberlakukan dari pada sesudah diberlakukan. Sekali diberlakukan maka para pendukungnya akan kokoh mempertahankannya habis-habisan agar tidak berubah lagi.

#### **4. MENGUMPULKAN DATA SEBAGAI PENUNJANG PROSES ADVOKASI**

##### **Sumber Data**

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.

Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

##### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Demikian juga dalam kegiatan advokasi, mengumpulkan data adalah bagian penting. Dari data, pembuat kebijakan dapat melihat bagaimana fakta-fakta di lapangan mengenai kasus yang diangkat oleh tim advokasi.

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.



Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara, camera photo dan lainnya. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah angket, observasi dan wawancara.

#### **a. Angket**

Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2007:163) terkait dengan prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran dan penampilan fisik.

Prinsip Penulisan angket menyangkut beberapa faktor antara lain :

- Isi dan tujuan pertanyaan artinya jika isi pertanyaan ditujukan untuk mengukur maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawaban.
- Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris, dsb.
- Tipe dan bentuk pertanyaan apakah terbuka atau tertutup. Jika terbuka artinya jawaban yang diberikan adalah bebas, sedangkan jika pernyataan tertutup maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan.

#### **b. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.



### ***Participant Observation***

Dalam observasi ini, tim pengumpul data secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Misalnya seorang dosen dapat melakukan observasi mengenai bagaimana perilaku mahasiswa, semangat mahasiswa, kemampuan manajerial dekan, hubungan antar dosen, dsb.

### ***Non participant Observation***

Berlawanan dengan participant Observation, Non Participant merupakan observasi yang tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Misalnya tentang pola pembinaan olahraga, dimana tim pengumpul data advokasi menempatkan dirinya sebagai pengamat dan mencatat berbagai peristiwa yang dianggap perlu. Kelemahan dari metode ini adalah data yang didapat tidak mendalam karena hanya bertindak sebagai pengamat dari luar tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalam peristiwa. Alat yang digunakan dalam teknik observasi ini antara lain : lembar cek list, buku catatan, kamera photo, dll.

### **c. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara dengan sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data.

Wawancara terbagi atas :

1. Wawancara terstruktur artinya penanya telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera photo, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.
2. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu penanya tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.





## **Kelebihan dan Kekurangan dalam Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Metode Observasi**

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data, jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria berikut:

- Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis.
- Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan.
- Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.

Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya. Penggunaan pengamatan langsung sebagai cara mengumpulkan data mempunyai beberapa keuntungan antara lain :

Pertama. Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu kejadian tersebut berlaku, atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Dengan cara pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang;

Kedua. Pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek baik tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Adakalanya subjek tidak mau berkomunikasi, secara verbal dengan enumerator atau peneliti (pengumpul data), baik karena takut, karena tidak ada waktu atau karena enggan. Dengan pengamatan langsung, hal di atas dapat ditanggulangi. Selain dari keuntungan yang telah diberikan di atas, pengamatan secara langsung sebagai salah satu metode dalam mengumpulkan data, mempunyai kelemahan-kelemahan.

### **b. Metode Wawancara**

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan



alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telpon.

### **Wawancara Tatap Muka**

Beberapa kelebihan wawancara tatap muka antara lain :

- Bisa membangun hubungan dan memotivasi responden
- Bisa mengklarifikasi pertanyaan, menjernihkan keraguan, menambah pertanyaan baru
- Bisa membaca isyarat non verbal
- Bisa memperoleh data yang banyak

Sementara kekurangannya adalah :

- Membutuhkan waktu yang lama
- Biaya besar jika responden yang akan diwawancara berada di tempat yang jauh
- Responden mungkin meragukan kerahasiaan informasi yang diberikan
- Pewawancara perlu dilatih
- Bisa menimbulkan bias pewawancara
- Responden bias menghentikan wawancara kapanpun

### **Wawancara Via Telpon**

Kelebihan :

- Biaya lebih sedikit dan lebih cepat dari wawancara tatap muka
- Bisa menjangkau daerah geografis yang luas
- Anomalitas lebih besar dibanding wawancara pribadi (tatap muka)

Kelemahan :

- Isyarat non verbal tidak bisa dibaca
- Wawancara harus diusahakan singkat
- Nomor telpon yang tidak terpakai bisa dihubungi, dan nomor yang tidak terdaftar pun dihilangkan dari sampel

### **c. Metode Kuesioner**

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap dan biasanya sudah menyediakan pilihan



jawaban (kuesioner tertutup) atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas (kuesioner terbuka).

Penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penyerahan kuesioner secara pribadi, melalui surat, dan melalui email. Masing-masing cara ini memiliki kelebihan dan kelemahan, seperti kuesioner yang diserahkan secara pribadi dapat membangun hubungan dan memotivasi responden, lebih murah jika pemberiannya dilakukan langsung dalam satu kelompok, respon cukup tinggi.

### **Etika Dalam Pengumpulan Data**

Beberapa isu etis yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan data antara lain :

1. Memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab pengumpul data.
2. Tim pengumpul data harus menyampaikan tujuan dari pengumpulan data kepada subjek dengan jelas.
3. Informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan, dan jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk penelitian, maka penyampaian harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada responden, dan memberikan alasan spesifik mengapa informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.
4. Apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar
5. Tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei dan responden yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati.
6. Tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan.

### **5. MENGIDENTIFIKASI PIHAK YANG *PRO* DAN *KONTRA***

Apabila ada sebuah isu yang akan diadvokasi atau mengangkat sebuah isu dan ingin menciptakan sebuah kebijakan, maka sudah jadi barang tentu ada kelompok-kelompok yang mendukung dan juga tidak. Biasanya kelompok pendukung adalah kelompok yang seide dengan visi dan misi dengan LDFK, sedangkan kelompok yang bertentangan sebaliknya.



Usaha advokasi yang berhasil juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai siapa yang mendukung atau menentang isu tertentu dan penyebabnya. Berdasarkan hal-hal pokok dengan daya pengaruh yang telah diidentifikasi sebelumnya, staf harus mencari tahu posisi dari pembuat kebijakan dari setiap isu.

Posisi pembuat kebijakan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok berpengaruh, maka anggota tim advokasi perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok berpengaruh yang mendukung atau menentang permasalahan yang ada. Jika perlu, mengadakan pertemuan dengan perwakilan kelompok tingkat tinggi untuk membahas isu terkait. Berdasarkan hasil riset ini, staf komite harus membuat tabel yang menunjukkan organisasi-organisasi yang mendukung, menentang dan abstain untuk tiap-tiap isu.

Staf advokasi dengan demikian akan mengetahui:

- Pembuat kebijakan penting yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan mengenai permasalahan tertentu
- Aktor penentu yang terkait dan berpengaruh terhadap permasalahan tersebut
- Arah dari kebijakan yang ditetapkan
- Staf harus menggunakan informasi ini untuk mengembangkan strategi advokasi yang efektif.

## **6. MEMBENTUK ALIANSI**

Aliansi adalah pihak yang memiliki kepentingan yang sama dan mau diajak bekerjasama. Salah satu caranya adalah dengan melakukan koalisi, yaitu cara untuk meningkatkan jumlah organisasi dan individu yang mendukung posisi organisasi LDFK dan Tim advokasi. Koalisi penting dibentuk terutama bila pendukung LDFK dan tim advokasi hanya memiliki sedikit anggota, namun di pihak lain membutuhkan banyak dukungan agar usulan perubahan diterima. Semakin banyak pendukung, semakin besar kemungkinan pembuat kebijakan akan mendengarkan. Koalisi harus mengembangkan visi dan kredibilitas upaya advokasi. Akan lebih banyak yang bisa dicapai jika koalisi dilakukan dengan tulus dan tidak untuk mencari pujian atau sekedar demi kepentingan tertentu.

Tips dan tahapan membangun koalisi adalah sebagai berikut:

- Gunakan informasi yang telah dikumpulkan



- Hubungi pimpinan organisasi yang mendukung posisi asosiasi
- Tanya apakah mereka bersedia membangun koalisi untuk mengajukan isu yang menjadi permasalahan bersama
- Atur pertemuan dengan tokoh penentu masing-masing organisasi
- Tanyakan sejauh mana mereka bersedia terlibat dalam aktifitas koalisi
- Anggota koalisi perlu sepakat mengenai hal-hal berikut:
  - Rantai komando
  - Pembagian tugas
  - Strategi dan jadwal advokasi
  - Pengaturan dana
  - Juru bicara koalisi
  - Koordinator koalisi
  - Pesan bersama

Satukan posisi berdasarkan fakta dan hasil riset mutakhir, kompromikan pesan bersama tim advokasi, adakan sedikit penyesuaian posisi masing-masing, tanpa mengabaikan tujuan dan target tim advokasi yang belum disepakati. Langkah ini ini perlu dilakukan untuk menyatukan suara agar hasil yang dicapai lebih efektif.

**Koordinator koalisi** harus berkomunikasi secara teratur dengan mitra koalisi untuk memastikan bahwa mereka saling mengetahui mengenai kegiatan, acara, rencana dan perkembangannya untuk pencapaian tujuan maupun pelaksanaan tugas koalisi. Koordinator misalnya perlu memberikan pengumuman kepada anggota koalisi mengenai acara penting seperti dengar pendapat, pertemuan dengan pengambil kebijakan atau rapat koordinasi advokasi sehingga mereka dapat berpartisipasi. Dengan demikian ini juga akan semakin meningkatkan ikatan solidaritas dan komitmen terhadap koalisi. Dukungan dari kelompok-kelompok organisasi yang ada akan semakin meningkatkan kemungkinan bahwa pembuat kebijakan akan memperhatikan rekomendasi anda dengan sungguh-sungguh.

## 7. MENGGUNAKAN MEDIA, MENGEMAS ISU DAN MEMBENTUK OPINI PUBLIK

Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu komunikasi, media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan ala-alat komunikasi. Kalimat media sebenarnya berasal dari bahasa latin yang secara harafiah mempunyai



arti perantara atau pengantar. Dikenal tiga macam media. Ada media cetak, media elektronik dan media masa.

Dalam advokasi LDFK, media yang dapat digunakan adalah media cetak dan media elektronik. Media cetak dapat berupa majalah LDFK, brosur mingguan, hasil-hasil kajian, proposal ajuan, kuisisioner, poster, spanduk dan lainnya. Media elektronik yang dapat digunakan berupa *handphone* (media sosial), presentasi melalui *power point*, radio kampus dan contoh lainnya.

Terdapat dua tujuan penggunaan media yaitu untuk alat komunikasi staf advokasi dan penyampai pesan advokasi ke pihak-pihak tertentu. Media juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan FK tersebut. Media yang terbilang canggih belum tentu dapat mempermudah advokasi. Bisa saja banyak di lingkungan FK yang lebih umum dengan menggunakan media cetak ketimbang media elektronik. Sebaiknya pemilihan media adalah dengan mempertimbangkan banyaknya pengguna. Misalnya, media sosial dan brosur mingguan.

Dengan adanya media, tim advokasi dapat mempengaruhi banyak individu di lingkungan FK tanpa perlu bertatap muka langsung dan mengeluarkan banyak tenaga. Sehingga tujuan dari pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Melalui pesan yang disampaikan melalui media tersebut, diharapkan adanya dukungan dari yang abstain, memperoleh dukungan dari individu dan kelompok yang sebelumnya menentang, mempermudah mahasiswa FK lain untuk mendukung isu dan memperkuat komitmen dari pendukung yang sudah ada. Sehingga banyak kalangan yang mendukung dengan kegiatan advokasi tersebut dan pembuat kebijakan pun akan melihat perkembangan yang terjadi di lingkungan FK.

Media presentasi dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau pemegang kekuasaan. Bila usulan advokasi kita diterima dan suatu saat pembuat kebijakan meminta kita untuk mempresentasikan isu yang diangkat. Maka cara mempresentasikan dan apa yang dipresentasikan akan menjadi bagian terpenting saat itu. Bisa juga, bila tim advokasi mengajukan permintaan sebuah pertemuan bersama petinggi-petinggi dekanat untuk menyampaikan isu advokasi yang akan diangkat.

## **Pengumpulan Data (Survey) II**

Pengumpulan data yang kedua ini dilakukan untuk melihat perkembangan dari usaha advokasi melalui media. Gambaran data yang mungkin didapatkan adalah



perubahan dari jumlah pendukung yang semakin meningkat. Sehingga data yang didapatkan dapat dimanfaatkan oleh tim advokasi untuk mempengaruhi pembuat kebijakan.

### **Mengemas Isu**

Dalam setiap kasus, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemas pesan (informasi, fakta, pernyataan, dll), ketika menggunakan media, antara lain :

1. Menampung kepentingan masyarakat dan mengandung hal-hal yang menarik perhatian orang (*human interest*)
2. Harus mengandung unsur berita, memang aktual dan penuh dengan isu yang kita sampaikan.
3. Singkat, langsung pada pokok permasalahan
4. Meyakinkan dengan memberikan penjelasan mengapa permasalahan itu penting dan membutuhkan dukungan
5. Tunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan jika memang ada
6. Persiapkan juga jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat diantisipasi
7. Ada orang yang memang tepat, cakap, berpengaruh dan terpercaya bertindak sebagai "juru bicara" untuk menyampaikan secara lancar dan mudah dipahami.
8. Lebih bagus lagi (dan sangat disarankan) melengkapinya dengan bahan-bahan visual ( foto, gambar, grafis, dll).

Sementara itu, pesan pada pembuat kebijakan harus mencakup:

1. Mengapa permasalahan ini penting
2. Berapa jumlah orang dan/atau kelompok yang mendukungnya (daftar tanda tangan dapat sangat meyakinkan)
3. Bagaimana dampak positif dan negatif proposal yang diajukan
4. Hal-hal apa yang perlu untuk dilakukan secara khusus (antara lain kebijakan, atau peraturan mana yang perlu untuk dilaksanakan, dihapuskan atau direvisi)
5. Bahasa atau rancangan aktual dari kebijakan atau peraturan yang diusulkan



## 8. MEMPENGARUHI SASARAN ADVOKASI

Satu hal yang penting dari kampanye advokasi yang efektif adalah adanya target yang teridentifikasi secara tepat dan strategi yang digunakan untuk menjawab setiap permasalahan. Prioritas kampanye advokasi harus ditetapkan dengan mengidentifikasi target/sasaran dalam urutan yang tepat. Setiap aksi yang berkelanjutan harus dibangun berdasarkan pencapaian yang sudah diraih atau hal yang telah dikuasai.

Ada beberapa target atau sasaran advokasi, yang didalamnya mencakup target “orang dalam” dan “orang luar”.

Advokasi “orang dalam” melibatkan:

- Pertemuan-pertemuan dengan pembuat kebijakan.
- Pemberian analisis dan informasi

Sedangkan advokasi “orang luar” meliputi:

- Mempengaruhi massa melalui media
- Mengembangkan aktivitas-aktivitas di tingkat akar rumput (*grass root*)
- Membangun koalisi

### Advokasi “Orang Dalam”

Jika sebuah masalah diidentifikasi secara dini, hubungan advokasi biasanya dimulai dari para pembuat kebijakan. Kontak harus dibuat pada tingkat yang sewajarnya. Ketika pembuat kebijakan mempertimbangkan sebuah permasalahan yang diadvokasi, itu menandakan bahwa ia sudah mulai terpengaruh. Agar upaya itu berhasil, Tim Advokasi harus memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang proses pembuatan kebijakan atau peraturan.

Pertemuan dengan pembuat kebijakan dapat berlangsung sebentar dan dapat juga berlangsung lama. Belum lagi kesibukan dari pihak pembuat kebijakan, jadwal kuliah yang padat, dan lain-lain. Oleh karena itu Tim Advokasi membutuhkan pertimbangan dan persiapan untuk merajut serta merangkai hasil-hasil pertemuan tersebut, sehingga hasilnya cukup efektif mendukung kebijakan LDFK.

Untuk membangun dan mengembangkan hubungan panjang yang positif serta menjadi bagian dari proses advokasi, dapat dipertimbangkan beberapa tindakan berikut:





- Memastikan para pembuat kebijakan terkait memiliki informasi tentang apa yang telah dilakukan; siapa yang sedang melakukan advokasi; masalah-masalah yang tengah dihadapi; dan tujuan-tujuan kegiatan advokasi tersebut.
- Menjalin hubungan baik dengan pembuat kebijakan..
- Sebagai Tim Advokasi pastikan menghadiri setiap sesi publik dan jika dimungkinkan berikan bukti-bukti yang diperlukan, pastikan pula mereka yang memiliki pengaruh mengetahui kehadiran atau keberadaan kita.

### **Advokasi “orang luar”**

Tidak cukup hanya dengan meangadvokasi orang dalam. Karena terkadang keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan juga mempertimbangkan perkembangan masyarakat FK “orang luar”, apalagi mahasiswa yang berpengaruh di FK seperti BEM, organisasi intra fk lain atau mungkin dosen tertentu.

Advokasi akan semakin mudah bila banyak orang luar yang mendukung LDFK, apalagi semua mahasiswa FK setuju dan seide. Namun, akan semakin sulit bila banyak penentang dari isu yang diangkat.

Tingkat LDFK biasanya berada di bawah BEM secara struktural. Sehingga bila ingin advokasi berjalan lancar, maka LDFK harus berkoalisi dengannya. Dukungan data dan hasil analisis tim advokasi akan membantu kemudahan advokasi. Dapat juga berkoalisi dengan dosen yang mendukung kita.

## **9. MELAKUKAN PENGAWASAN**

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengawasan. Mengawasi proses pembentukan kebijakan setelah dilakukannya usaha-usaha advokasi dan melihat perkembangan yang terjadi diantara pembuat kebijakan. Bila dalam suatu pertemuan dengan pembuat kebijakan, tim advokasi dijanjikan akan dibuatnya kebijakan tertentu sesuai isu yang diangkat. Maka, tim advokasi berhak mengingatkan dan menanyakan kembali niat, keinginan dan janji pembuat kebijakan tentang hal-hal yang telah disampaikan tim advokasi.

Usaha pengawasan ini juga bermanfaat bagi tim advokasi dalam melakukan tindakan advokasi secara mendadak, bila ternyata ada permasalahan baru yang muncul diantara pembuat kebijakan. Misalnya dengan memilih bentuk dan alur advokasi lain.



## 10. ADANYA RESPON (HASIL ADVOKASI) DAN EVALUASI

Setelah melakukan tahap-tahap advokasi, maka harus ada yang dihasilkan. Hasil advokasi tersebut sesuai dengan tujuan yang telah kita tentukan di awal. Namun, Bila kegiatan advokasi tidak menghasilkan sebuah pencapaian tertentu. Maka harus dilakukan evaluasi dan resolusi.

Sebuah kerugian bila ternyata apa yang direncanakan oleh tim advokasi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Terlebih lagi sudah mengeluarkan dana yang lumayan banyak, tenaga dan juga pikiran. Misalnya saja, advokasi yang dilakukan oleh tim advokasi tidak merubah pola pikir pembuat kebijakan atau tidak dapat mempengaruhinya sedikitpun. Sehingga kebijakan tersebut tidak dapat direvisi sama sekali atau ide dari tim tidak diterima oleh dekanat.

Evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan kembali melihat apa-apa saja yang menjadi kekurangan dari advokasi. Seringkali kegagalan dalam melakukan advokasi ini diakibatkan oleh tim advokasi yang tidak solid, kurangnya dukungan dari masyarakat FK/ civitas akademika, presentasi yang tidak menarik, mengangkat isu namun tidak disertai solusi yang baik dan masukan yang diusulkan terlalu sulit untuk dicapai oleh dekanat. Selain itu, dapat juga disebabkan kurang berpengaruhnya atau *bergaining position* yang tidak dimiliki oleh LDFK di mata dekanat dan mahasiswa FK.

Biasanya dalam advokasi yang dapat kita lihat sehari-hari, bila usaha diskusi atau negosiasi tidak berhasil maka tindakan advokasi lain yang agak keras sering dijadikan pihan, seperti unjuk rasa dan aksi lainnya. Dalam advokasi LDFK, usaha musyawarah dan berkepal dingin lebih diutamakan ketimbang aksi-aksi anarkis, terlebih lagi hingga menutup dan merusak fasilitas FK, berhenti dari perkuliahan dan kegiatan negatif lainnya. Bila dekanat mengambil kebijakan yang teramat jauh dari ajaran-ajaran islam, membubarkan LDFK tanpa alasan yang jelas, tidak merespon terhadap isu-isu yang sangat genting (ex; penyebaran aliran-aliran sesat, kecurangan tertentu), maka tidak menutup kemungkinan bagi tim advokasi LDFK, aliansi dan umat islam FK lainnya untuk melakukan aksi-aksi tertentu yang levelnya lebih di atas dari diskusi atau negosiasi.



## **E. CONTOH PROPOSAL ADVOKASI**

### **Advokasi “Kawasan Kampus Bebas Rokok”**

#### **ADVOKASI “KAWASAN KAMPUS BEBAS ROKOK” DI UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG**

##### **I. LATAR BELAKANG**

Merokok merupakan suatu kebiasaan yang merugikan kesehatan dan penyebab utama runtuhnya kesehatan manusia serta menyebabkan kematian dini. Lima ratus juta orang yang dewasa ini hidup di muka bumi akan meninggal akibat kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok kini merupakan penyebab kematian 10 % penduduk dunia. Pada tahun 2030, atau bahkan mungkin lebih cepat dari itu, satu dari enam manusia akan meninggal akibat kebiasaan merokoknya.

Kebiasaan merokok itu telah terbukti berhubungan dengan sedikitnya 25 jenis penyakit pada berbagai organ tubuh, antara lain kanker saluran pernafasan hingga paru, kandung kemih, bronchitis kronik, dan penyakit jantung. Selain itu, kebiasaan merokok juga berhubungan dengan gangguan pembuluh darah di otak (*stroke*), penyakit saluran cerna, gangguan katarak di mata, membuat kulit cepat keriput dan bahkan sampai impotensi. Dari 25 jenis penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok, beberapa diantaranya bahkan dapat menimbulkan kematian, antara lain kanker pada saluran pernafasan, gangguan pada pembuluh darah, hingga gangguan pada janin dan kelahiran berat rendah, kematian pre-natal, kelahiran premature dan rentan terhadap keguguran pada wanita yang merokok.

Dewasa ini di seluruh dunia diperkirakan terdapat 1,26 milyar perokok, lebih dari 200 juta diantaranya adalah perempuan. Data WHO menyebutkan di negara berkembang jumlah perokoknya 800 juta orang, hampir tiga kali lipat negara maju. Setiap harinya sekitar 80-100 ribu remaja di dunia yang menjadi pecandu dan ketagihan rokok. Bila pola ini terus menetap maka sekitar 250 juta anak – anak yang hidup sekarang ini akan meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Di tahun 2000 ditemukan 3,5 juta kematian akibat rokok setahunnya, dimana 1,1 juta diantaranya terjadi di negara- negara berkembang. Angka



kematian tersebut diperkirakan meningkat menjadi 10 juta orang pada tahun 2025, 70% berasal dari negara-negara berkembang. Sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke 5 dalam konsumsi rokok dunia, serta peringkat ke 7 dalam penghasil tembakau.

Data Survei Nasional tahun 2004 menyebutkan bahwa 63,2 % laki-laki dan 4,4 % perempuan Indonesia adalah perokok. Secara keseluruhan (laki-laki dan perempuan digabung) maka lebih dari 30 % penduduk Indonesia merokok, artinya di negara kita ada sekitar 60 jutaan orang perokok.

Sedangkan kegiatan merokok sendiri telah menjadi salah satu lambang kebanggaan atau kedewasaan bagi kelompok remaja. Sekarang sudah bukan hal yang baru jika remaja pada saat ini sudah merokok serta kecanduan dengan rokok. Kebanyakan remaja memulai kebiasaan merokok karena ikut-ikutan teman, selain karena terpengaruh oleh *image* yang diciptakan oleh produsen rokok (misalnya, dengan menggunakan idola remaja sebagai bintang iklan) atau karena punya orangtua perokok. Berbagai faktor pemicu meningkatnya angka merokok pada remaja adalah iklan dan promosi besar-besaran dari industri rokok, mudahnya mengakses produk rokok, dan harganya yang terjangkau.

Penelitian dilakukan oleh Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr Hamka, remaja usia sekolah sangat terpengaruh oleh iklan rokok. Sebanyak 81 persen responden dari 353 siswa SMP, SMA, dan SMK mengaku pernah mengikuti kegiatan yang disponsori oleh perusahaan rokok.

Suatu hal yang sangat memprihatinkan adalah usia mulai merokok dari tahun ke tahun semakin muda. Sekitar 70% dari perokok di Indonesia memulai kebiasaannya sebelum berumur 19 tahun, karena terbiasa melihat anggota keluarganya yang merokok. Data juga menunjukkan bahwa sebagian besar (84%) dari perokok Indonesia yang merokok setiap hari ternyata menghisap 1-12 batang per hari dan 14% merokok sejumlah 13-24 batang sehari. Perokok 25 batang atau lebih sehari hanya 1,4 % saja.

Di tingkat dunia sudah ada FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*) FCTC telah disetujui 192 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Mei 2003. Tujuan dari FCTC adalah melindungi masyarakat dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan, dan konsekuensi ekonomi akibat konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau. Kini FCTC telah menjadi hukum internasional dan 137 negara telah meratifikasinya. Satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani



adalah Indonesia. Indonesia belum meratifikasi FCTC karena tekanan dari industri rokok, dan ketidaktahuan pemerintah mengenai perincian FCTC.

Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004, prevalensi perokok anak usia 13 tahun sampai 15 tahun mencapai 26,8 persen dari total populasi Indonesia. Sementara, tren usia perokok semakin dini, yakni usia lima tahun sampai sembilan tahun dan mencapai 1,8 persen. Meningkatnya prevalensi perokok usia dini sebanding dengan masifnya iklan dan promosi yang dilakukan oleh industri rokok. Indonesia adalah negara yang iklan, promosi dan sponsor rokoknya paling masif di Asia Tenggara. Indonesia juga adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. KNPA mencatat, ada sebanyak 2.846 tayangan televisi yang disponsori oleh industri rokok di 13 stasiun televisi. Dan, tercatat 1.350 kegiatan yang diselenggarakan atau disponsori industri rokok, mulai dari kegiatan musik, olah raga, film layar lebar, hingga keagamaan. Iklan dan sponsor industri rokok.

Survei yang dilakukan Global Health Professional Survey (GHPS) tahun 2006 terhadap mahasiswa fakultas kedokteran di Indonesia, menunjukkan hasil yang di luar dugaan. Survei itu melaporkan hampir separuh (48,4 persen) mahasiswa/i kedokteran yang seharusnya menjadi ujung tombak sosialisasi bahaya rokok, mengaku pernah merokok dan sebanyak 9,3 persen yang menyatakan masih merokok hingga sekarang. Mahasiswa (laki-laki) yang merokok sebanyak 21 persen dan mahasiswi 2,3 persen dengan tingkat kecanduan mencapai 33 persen atau dengan kata lain 1 dari 3 perokok tadi tergolong kecanduan dengan parameter 30 menit bangun tidur langsung merokok.

Rokok, satu benda yang begitu populer di kalangan masyarakat. Kampus sebagai wahana berekspresi mahasiswa dalam berbagai kegiatan seringkali memerlukan dana besar dalam setiap pelaksanaannya, sehingga ketika ada sponsor yang berani menawarkan dana besar pastilah menjadi sesuatu yang menggiurkan bagi mahasiswa. Oleh karena itu tidaklah mengherankan, dengan berbagai strateginya perusahaan rokok bermodal besar siap mendukung berbagai kegiatan yang diajukan kepada mereka, apalagi jika kegiatan itu yang bersifat *having fun* dan “anak muda banget”. Maka industri rokok, di kalangan mahasiswa, adalah “nirwana” sumber dana, sponsor yang paling mudah mengeluarkan dana dan siap mengeluarkan dana besar untuk proposal yang diajukan.

Namun ternyata, di balik “nirwana” dana tersebut, ada sebuah aturan dan etika yang secara terang-terang dilibas habis oleh industri rokok. Di dalam kampus, industri



rokok tidak lagi mengindahkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Di dalam peraturan tersebut, tepatnya pasal 22 secara jelas dinyatakan bahwa institusi pendidikan adalah kawasan tanpa rokok.

Universitas Diponegoro (Undip) adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Semarang yang merupakan tempat bagi sekitar 37.609 orang mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia menimba ilmu, dengan jumlah dosen tetap 1.646 orang dan 600 staf pengajar tidak tetap. Sedangkan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Semarang dengan jumlah mahasiswa sekitar 9.000 orang dan staf pengajar sekitar 300 orang. Undip maupun Udinus adalah rujukan bagi aktivitas akademik maupun kemahasiswaan di Kota Semarang sehingga penting menerapkan kawasan bebas rokok di kampus ini untuk mengawali terciptanya kawasan bebas rokok di Semarang khususnya dan Jawa Tengah umumnya.

Advokasi "Kawasan Kampus Bebas Tembakau" tahun 2008 di Undip akan dimulai di Fakultas Kesehatan Masyarakat, sedangkan di Udinus di Fakultas Kesehatan dan Fakultas Ekonomi. Di Udinus dipilih dua fakultas tersebut karena keduanya terletak pada gedung yang sama. Program ini diharapkan akan berlanjut ke fakultas-fakultas lain pada tahun berikutnya.

## **II. TUJUAN KEBIJAKAN (*POLICY OBJECTIVES*)**

Lahirnya kebijakan "Kawasan Kampus Bebas Tembakau" yang diimplementasikan secara nyata di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro serta Fakultas Kesehatan dan ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

## **III. TARGET**

- Rektor, Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Diponegoro
- Rektor, Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Dian Nuswantoro
- Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
- Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro
- Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro



#### **IV. PESAN (*MESSAGE*)**

- "Kawasan Kampus Tanpa tembakau" akan meningkatkan citra kampus sebagai lembaga pendidikan yang peduli dengan masa depan generasi bangsa.
- Menciptakan kampus yang mandiri secara intelektual, akademik, dan ekonomi tanpa tembakau.
- Tanpa tembakau kawasan kampus menjadi lebih sehat, aktivitas kampus lebih optimal, mahasiswa lebih berprestasi.
- Merokok dan Promosi rokok di kampus adalah tindakan melanggar peraturan (elegal)

#### **V. PENYAMPAI PESAN (*MESSANGER*)**

- Tim Advokasi "Kawasan Kampus Tanpa tembakau" Undip dan Udinus
- Undip : Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc.
- Udinus : dr. Lily Kresnowati

#### **VI. METODE PENYAMPAIAN PESAN (*ENSURE MESSAGE REACHES THE POLICY MAKER*)**

- Audiensi dengan Rektor, Wakil Rektor di Undip dan Udinus
- *Round table discucussion* dengan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro di Undip dan Udinus
- Seminar tentang "Kawasan Kampus Tanpa tembakau" di Undip dan Udinus
- Mobilisasi massa dengan aksi simpatik mahasiswa "Membebaskan Kampus dari Tembakau"
- Deklarasi "Kawasan Kampus Tanpa tembakau" di Undip dan Udinus

#### **VII. PENGGUNAAN MEDIA SECARA EFEKTIF (*UTILIZE MEDIA EFFECTIVELY*)**

Media adalah kekuatan penting dalam pelaksanaan "Kawasan Kampus Tanpa tembakau". Beberapa media yang akan dipakai untuk mengkampanyekan "Kawasan Kampus Tanpa tembakau" adalah :

- TVKU (Televisi Kampus Udinus) yang merupakan televisi lokal yang mempunyai daya jangkauan siaran di Pantura dan sebagian Jawa Tengah bagian Selatan. TVKU bisa dijadikan media kampanye "Kawasan Kampus Tanpa tembakau" melalui



acara talkshow (evening talks), peliputan kegiatan diskusi, seminar, deklarasi (edunews) maupun program Campus on TV, serta iklan layanan masyarakat.

- Televisi lokal lain seperti TVB, Cakra Semarang TV, Pro TV, TVRI Semarang melalui program news, iklan layanan masyarakat dan program lain yang memungkinkan.
- Televisi Nasional (Metro TV, SCTV, RCTI, Trans TV, Trans 7, dll) melalui program News
- Koran Suara Merdeka, Jawa Pos dan Kompas melalui berita dan opini.
- Media alternatif yang dipakai adalah "Kampanye Kampus Tanpa Tembakau" yang dilakukan dengan pentas musik, teater, tari, pameran fotografi, pameran poster tentang bahaya rokok.

## **VIII. KEKUATAN DAN KELEMAHAN PROMOSI ROKOK (*THE STRENGTHS AND WEAKNESSES OF THE OPPOSITION*)**

### **Kekuatan Promosi Rokok**

- Rokok menyumbangkan dana untuk kegiatan kemahasiswaan di kampus (pentas musik dan event olah raga)
- Rokok memberikan beasiswa untuk mahasiswa
- Sebagian besar civitas akademika di kampus adalah pro-rokok

### **Kelemahan Promosi Rokok**

- Promosi rokok di kampus melanggar PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, pasal 22 yang menyatakan bahwa institusi pendidikan adalah kawasan tanpa rokok.
- Promosi rokok di kampus merusak masa depan generasi muda Indonesia.

## **IX. PIHAK-PIHAK YANG BISA DILIBATKAN (*OTHER VOICES*)**

- BEM dan Himpinan Mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
- BEM dan Himpinan Mahasiswa di Fakultas Kesehatan dan Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro
- LSM Lembaga Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Anak.
- Indonesia Tobacco Control Network terutama untuk dukungan narasumber
- Korps Sukarela PMI (KSR PMI) di masing-masing universitas





- UKM musik, teater, tari, fotografi, dll, dari di masing-masing universitas.
- IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) Propinsi Jawa Tengah

#### X. ORGANISASI PELAKSANA

- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro:  
Contact Person : dr. Badoes Wijanarko, MPH
- Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro :  
Contact Person : Nurjanah, SKM
- IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) Propinsi Jawa Tengah,  
Contact Person : dr. Antono Suryoputro, MPH

#### XI. JADWAL KEGIATAN (TIME FRAME)

No	Kegiatan	Sasaran	Waktu														
			2008 (bulan)						2009 (bulan)								
			5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
1	Pembuatan proposal	Tim advokasi															
2	Pengiriman proposal	TCSC – IAKMI															
3	Review Proposal																
4	Audiensi	Rektor, WR															
5	<i>Round table discucussion</i>	Rektor, WR, Dekan, Ka Biro															
6	Seminar tentang "Kawasan Kampus Tanpa tembakau"	Civitas akademika															
7	Mobilisasi massa: Aksi simpatik mahasiswa	Civitas akademika															
8	Deklarasi "Kawasan Kampus Tanpa	Civitas															



	tembakau”	akademika																		
9	Media advocacy : press release, peliputan kegiatan	Media lokal & nasional																		
10	Media alternatif: pentas seni, pameran	Civitas akademika																		
11	Aplikasi hasil advocacy	Civitas akademika																		
12	Evaluasi	Civitas akademika																		
13	Laporan																			

## XI. ANGGARAN

### I. Persiapan

1	Pembuatan proposal																			
	a. Pengandaan proposal																			
	b. Pengiriman proposal																			
	c. Review Proposal																			
	~ Transportasi																			
	~ Akomodasi																			
																				Rp 1.950.000

### II. Pelaksanaan

1	Audiensi																			
	a. Transportasi	2	X	4	X	25.000	Rp	200.000												
	b. Pengandaan Materi audiensi	2	X	5	X	25.000	Rp	250.000												
																				Rp 450.000
2	Round table discucussion																			
	a. Transportasi	2	X	15	X	25.000	Rp	750.000												
	b. Konsumsi	2	X	25	X	25.000	Rp	1.250.000												
	c. Pengandaan materi	2	X	25	X	10.000	Rp	500.000												
																				Rp 2.500.000



3	Seminar tentang "Kawasan Kampus Tanpa tembakau"						
	a. Transportasi pembicara Jkt				Rp	1.000.000	
	b. Honor pembicara	4	X	1.000.0000	Rp	4.000.000	
	c. Konsumsi	300	X	6.000	Rp	1.800.000	
	d. Penggandaan materi	300	X	5.000	Rp	1.500.000	
	f. Sewa sound system			400.000	Rp	400.000	
	g. Backdrop				Rp	250.000	
	h. Spanduk	10	X	100.000	Rp	1.000.000	
	i. Dokumentasi				Rp	300.000	
							Rp 10.250.000
7	Mobilisasi massa: Aksi simpatik mahasiswa						
	a. Media kampanye					Rp	1.000.000
8	Deklarasi "Kawasan Kampus Tanpa tembakau"						
	a. Media deklarasi					Rp	1.000.000
9	Media advocacy : press release, peliputan kegiatan					Rp	1.000.000
10	Media alternatif: pentas seni, pameran	2	X	3.000.000	Rp	6.000.000	Rp 6.000.000
<b>III. Laporan</b>							
1	Penggandaan Laporan				Rp	500.000	500.000
	TOTAL						23.650.000



## DAFTAR PUSTAKA

- Aleta, T (2013) *Proposal Ajuan Advokasi*. <http://tinialeta.blogspot.co.id/>- Diakses Desember 2015.
- Hendryadi (2013). *Metode Pengumpulan Data* <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>- Diakses Desember 2015.
- Mukharrom, MT (2004). *Al-Mawarid Edisi XII: Teologi Advokasi*. <http://jurnalmawarid.com/index.php/almawarid/article/viewFile/54/49> - Diakses Desember 2015.
- Sekretariat Kadin Indonesia. *Pedoman Advokasi Kebijakan: membangun Kadin yang Efektif*. [http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/advocacy\\_guide\\_book\\_indonesian.pdf](http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/advocacy_guide_book_indonesian.pdf)- Diakses Desember 2015.

